

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara (DINAS PMD) Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahun kelima dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019 - 2021 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai.

Program Kegiatan pada RENJA 2021 ini mengacu pada Program Kegiatan pada RENSTRA tahun ke-5 dengan tetap mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya juga merumuskan program/kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya pada tahun 2019 - 2021 untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual dan permasalahan yang dihadapi.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021. Disamping itu juga untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja OPD tahun 2021 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan program/kegiatan yang direncanakan, dan semoga Program/Kegiatan yang disusun dan dilaksanakan nanti mampu memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

Tenggarong, Juli 2020


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala
Dafip Haryanto, S. Sos, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700924 199003 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.3.1 Maksud.....	3
1.3.2 Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II	5
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PMD TAHUN 2017	5
Tabel T-C.29.	8
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2019 (tahun berjalan) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
Tabel T-C.30.	20
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.....	20
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	22
1. Tingkat Pelayanan DINAS PMD	22
2. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	24
3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.....	26
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DINAS PMD Kabupaten Kutai Kartanegara	27
5. Formulasi isu-isu penting :.....	27
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	44
Tabel 2.5.3	45

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kabupaten Kutai Kartanegara.....	45
BAB III	50
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	50
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	50
Tabel 3.1	55
Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional dengan.....	55
Prioritas Pembangunan Daerah	55
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	57
Tabel 3.2	59
Sasaran yang ditempuh untuk mencapai tujuan	59
BAB IV	63
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	63
4.1 Rencana Program Kerja dan Kegiatan	63
Tabel 4. 1	63
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara	63
BAB V	86
P E N U T U P	86
a. Catatan penting	86
b. Kaidah kaidah pelaksanaan	87
c. Tindak Lanjut	87

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang undang 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Nasional, maka setiap pembangunan seyogyanya harus diselenggarakan melalui sebuah perencanaan yang sistematis dan terstruktur. Dan perencanaan tersebut harus dituangkan dalam sebuah dokumen yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Untuk menjalankan amanat undang undang tersebut, maka perencanaan pembangunan di daerah disusun melalui mekanisme penyerapan aspirasi, mengakomodasi kepentingan nasional serta kebutuhan daerah itu sendiri, selanjutnya dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Tahunan (RPT). Rencana Pembangunan Tahunan untuk kabupaten/kota disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004). Untuk membantu pelaksanaan tujuan RPJMD tersebut, maka Organisasi Perangkat Daerah membuat Rencana Strategis (RENSTRA) dan difokuskan lagi pada Rencana Kerja Tahunan dengan dituangkan dalam sebuah dokumen Rencana Kerja (RENJA) yang berpedoman pada RPJMD dan RENSTRA OPD.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara (DINAS PMD Kutai Kartanegara) mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RENJA OPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi dan program OPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) OPD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ;
2. RENJA OPD merupakan acuan atau pedoman bagi OPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2021
3. RENJA OPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan OPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja OPD.

Mengingat arti strategis RENJA OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA DINAS PMD Tahun 2021 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2021;
3. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang;
4. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

dapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA DINAS PMD Kutai Kartanegara Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Permendagri No.112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Permendagri No.81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
9. Permendagri No.82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Permendagri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Permendagri No.84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa;

12. Permendes No.2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
13. Permendes No.3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa;
14. Permendes No.4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
15. Permendagri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2006 Tentang BPD;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016;
22. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan RENJA DINAS PMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2020 (tahun berjalan) dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) DINAS PMD Kutai Kartanegara Tahun 2021.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya RENJA DINAS PMD Kutai Kartanegara Tahun 2021 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka sistematika penyusunan RENJA DINAS PMD Kutai Kartanegara Tahun 2021 meliputi :

- BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU, berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Renstra OPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- AB III TUJUAN, SASARAN berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja OPD.
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN : Program dan Kegiatan untuk proyeksi Tahun Anggaran 2021
- BAB V PENUTUP : Catatan Penting, Kaidah-kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PMD TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD :

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA DINAS PMD Tahun 2019 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
 - a) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan :
 - ~ Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal dengan capaian 0%.
 - ~ Fasilitasi TIM BEKIAS Perangkat Daerah SKPD 16%.
 - b) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan kegiatan :
 - ~ Lomba Posyandu Unggulan Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional 56%.
 - ~ Pembinaan dan Peningkatan Strata Posyandu 59%
 - c) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dengan kegiatan :
 - ~ Pendampingan Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP) 53%.
 - d) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - ~ Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Pemerintahan Desa 25%
 - ~ Klarifikasi Rancangan Peraturan Desa tentang RAPBDes 44%
 - ~ Fasilitasi Pemekaran Desa 0%
2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah :
 - a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :
 - ~ Penyediaan Jasa surat menyurat;
 - ~ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - ~ Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 - ~ Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - ~ Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - ~ Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - ~ Penyediaan Jasa Administrasi Tehknis Perkantoran;
 - ~ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - ~ Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
 - ~ Penyediaan Perlengkapan Hari-hari Tertentu.
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu :
 - ~ Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - ~ Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional
 - ~ Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan;
 - d) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan kegiatan :
 - Fasilitasi Penguatan Program Kelompok Binaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten
 - Pelaksanaan HKG PKK Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional
 - Jambore PKK Tingkat Nasional
 - e) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa :
 - Pendampingan Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP);
 - Pendampingan Program Inovasi Desa (PID)
 - Pendampingan dan penataan BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) dan UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) Ex PNPM Mandiri Perdesaan
 - f) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, dengan kegiatan :
 - Pemilihan dan Pelantikan Anggota BPD
 - Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun dan Profil Desa
 - g) Program Desa Pemberdayaan Masyarakat
 - Pemetaan Kebutuhan Sarana Prasarana Perdesaan;
 - Pemetaan Pengelolaan Potensi Sumber Daya pesisir dan laut
3. Realsasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
- Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2019, tidak terdapat kegiatan yang mampu melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program/kegiatan menjadi permasalahan mendasar yang bersifat krusial yang saat ini dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah masalah pendanaan kegiatan, untuk alokasi anggaran SKPD masih belum signifikan hal ini ditandai dengan masih adanya beberapa program dan kegiatan yang target kinerjanya belum terpenuhi dikarenakan beberapa hal yaitu diantaranya :
- a. Ada beberapa kegiatan yang dalam penyusunan RKA nya masih terdapat kesalahan-kesalahan, diantaranya adalah bertambah dan berkurangnya alokasi dana kegiatan (rasionalisasi) tidak dibarengi dengan perubahan pada target kinerja sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan, ada beberapa target kinerja yang tidak bisa tercapai;
 - b. Kemudian ada kesalahan dalam mencantumkan atau menyebutkan nama satuan target kinerja, yang seharusnya desa menjadi lokasi kegiatan dijadikan target kinerja;
 - c. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana, hal ini disebabkan karena beberapa permasalahan. Diantaranya adalah permasalahan pada ketidak pastian penyediaan dana untuk realisasi kegiatan tersebut.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RENSTRA DINAS PMD.

Sebagian besar program/kegiatan yang tidak tercapai merupakan kegiatan program/operasional. Akan tetapi ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai targetnya, seperti :

- a) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal dengan capaian 0%, Penyusunan Analisa Kompetensi ASN Intern SKPD 0%, Singkronisasi dan Harmonisasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Antar Kabupaten SE- Kalimantan Timur 0%, Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa 0%, Pembinaan dan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan 0%, Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Terpilih 0%, Rakortis dan Temu Kader Posyandu 0%, Pembinaan dan Penguatan Kinerja TP, PKK Kecamatan, Desa dan Kelurahan 0%, Fasilitasi Kesekretariatan PKK. Kab. Kutai Kartanegara 0%, Pembentukan Posyantek Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara 0%.
6. Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor :

Untuk dapat mewujudkan capaian target kinerja yang maksimal sangat diharapkan adanya penambahan alokasi dana anggaran SKPD sehingga kegiatan dapat berjalan dan mencapai sasaran serta dapat menjalankan tugasnya secara maksimal dan dapat melaksanakan program wajib dari pemerintah baik berupa program melekat maupun program bantuan yang diserahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kemudian perlunya peningkatan SDM, dan selanjutnya perlu dilakukan melalui kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi secara terpadu dan berkala serta berkesinambungan melalui pelatihan-pelatihan khususnya dalam bentuk pelatihan Penyusunan Program Kerja OPD, sehingga program dan kegiatan bidang dapat terintegrasi diantara semua bidang. Untuk pencapaian kinerja yang maksimal dibutuhkan sarana prasarana yang memadai yaitu diperlukannya gedung kantor yang memadai.

Untuk melihat secara lebih jelas tentang hal hal yang dipaparkan diatas, dapat perhatikan sebagaimana disajikan pada tabel data sebagai berikut :

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2019-2021	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan (2020)	
						Target Renja-PD Tahun (2019)	Realisasi Renja-PD Tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)	10	11 = 6+8+10	12 = (11/5)
	Urusan Wajib										
	Bidang Urusan										
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%								
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perangko, Materai dan benda lainnya yang disediakan	lbr	45000	0	9000	835	9,28	456	1291	2,87
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Waktu Jasa komunikasi, Air dan Listrik yang disediakan	Bulan/4 Rekening	60	15	48	24	50,00	48	87	145,00
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Honorarium Kegiatan	Orang	135	23	27	22	81,48	24	69	51,11
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	Jenis barang/paket	175	1	35	1	2,86	35	37	21,14
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Photocopy dan Barang cetak yang disediakan	Cetak/potocopy	73000	2700	73000	73000	100,00	73000	148700	203,70
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar/Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Surat kabar	15	3	3	10	333,33	0	13	86,67

RENCANA KERJA 2021

7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan /Jenis Logistik Kantor yang disediakan	Jenis barang	125	25	25	2	8,00	25	52	41,60
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rapat-rapat dan makan minum kantor	Porsi/Paket	7050	1	1410	2	0,14	1410	1413	20,04
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Orang	620	107	124	127	102,42	124	358	57,74
10	Penyediaan Jasa Administrasi Tehnis Perkantoran	Jasa Administrasi Tehnis Perkantoran	Orang	265	53	53	53	100,00	57	163	61,51
11	Penyediaan Perlengkapan Kegiatan Hari-hari tertentu	Even/kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	30	0	6	0	0,00	0	0	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100%							
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan	Unit Barang	250	0	50	0	0,00	50	50	20,00
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Unit Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Item	25	0	5	4	80,00	0	4	16,00
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharannya Kendaraan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Unit Kendaraan	220	4	44	0	0,00	28	32	14,55
4	Penyusunan Draf Peraturan perundang-undangan	Tersusunnya Draf Peraturan perundang-undangan	Draf Perbup/Perda	60	0	12,00	0				
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100%							
1	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Terpenuhinya kapasitas aparatur sesuai bidangnya	orang	630	0	124	14	11,29	0	14	2,22
2	Penyusunan Analisa Kompetensi ASN Intern SKPD	Tersusunnya Laporan Kompetensi ASN Intern SKPD	Dokumen	60	0	12,00	0				
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya aparatur yang berkompenten sesuai bidangnya	Orang	150	0	30	0	0,00	0	0	0,00
4	Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur	Terbinanya Mental dan Rohani bagi Aparatur	Orang	885	0	177	0	0,00	1	1	0,11

RENCANA KERJA 2021

5	Fasilitasi TIM BEKIAS Perangkat Daerah	Jumlah Anggota Tim Bekias	orang				0		10		
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Patutan Aparatur	%	100%	0						
1	Pengadaan Pakaian Dinas Harian	Pengadaan Pakaian Dinas Harian	Stel	885	0	177,00	0				
2	Pengadaan Pakaian Dinas Hari Tertentu	Pakaian Dinas Hari Tertentu	Stel	885	0	177	0	0,00	1	1	0,11
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100%							
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah Laporan yang disusun	Dokumen	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00
2	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan yang disusun	Dokumen	5	1	1	1	100,00	2	4	80,00
3	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan yang disusun	Dokumen	5	1	1	0	0,00	4	5	100,00
4	Penyusunan Laporan (LPPD dan LAKjIP)- skpd	Jumlah Laporan yang disusun	Dokumen	5	2	2	2	100,00	1	5	100,00
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Kegiatan SKPD	Jumlah Laporan yang disusun	Dokumen	20	4	4	6				
6	Pengelolaan Administrasi Perpajakan Intern SKPD	Jumlah Laporan yang disusun	Laporan	5	12	12	0	0,00	3	15	300,00
7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Desa	Jumlah Desa yang dimonitoring	Kecamatan	90	0	54	0				
8	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusnya Dokumen Renstra SKPD	Dokumen	5	1	1	0	0,00	0	1	20,00
9	Pemetaan Kebutuhan Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang disusun	Dokumen	5	1	1	0	0,00	0	1	20,00
10	Inventarisasi BMD	Jumlah kelurahan	Kelurahan			44	44	100,00			
11	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Fihak Ketiga	Jumlah SPM-LS	SPM-LS			6	6	100,00			

RENCANA KERJA 2021

6	Program Penataan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Penataan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan sistem Informasi keuangan dan aset Desa	%									
1	Penyusunan Dokumen Tata wilayah Desa	Tersusunnya Dokumen Tata Wilayah Desa, Perubahan Status, Penetapan, Penamaan, Kode Desa, Penataan Kewenangan Urusan Otonomi dan Penugasan Pemerintahan Desa;	Dokumen	5	0	1	0	0,00	0	0	0	0,00
2	Penyusunan Dokumen Perubahan Status, Penempatan, Penamaan, Kode Desa	Tersusunnya Dokumen Perubahan Status, Penempatan, Penamaan, Kode Desa	Dokumen	5	0	1	0	0,00	0	0	0	0,00
3	Penyusunan Dokumen Penataan Kewenangan Urusan Otonomi Desa	Tersusunnya Dokumen Penataan Kewenangan Urusan Otonomi Desa	Dokumen	5	0	1	0	0,00	0	0	0	0,00
4	Penyusunan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa	Tersusunnya Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	5	0	1	0	0,00	0	0	0	0,00
5	Penyusunan Standar Harga Barang Jasa (SHBJ) Pemerintahan Desa	Tersusunnya SHBJ Desa	Dokumen	5	0	1	0	0,00	0	0	0	0,00
6	Penyusunan LPPDesa	Tersusunnya LPPDesa	Dokumen	5	0	1	0	0,00	0	0	0	0,00
7	Penyusunan Laporan Keuangan Desa	Tersusunnya Laporan Keuangan Desa	Dokumen	5	0	1	0	0,00	0	0	0	0,00
8	Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa	Pemilihan dan Pelantikan Kepala desa	Desa	193	0	123	0	0,00	0	0	0	0,00
9	Penyaringan dan Pengangkatan Perangkat Desa	Pengangkatan dan Perhentian Perangkat Desa	Orang	2000	461	400,00	0					
10	Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;	Terselesainya Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;	Kasus	50	0	10	0	0,00	15	15	15	30,00
7	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	%									

RENCANA KERJA 2021

1	Pembinaan Perencanaan, Anggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan ,Pertanggungjawaban dan Pelaporan;	Penyusunan Perencanaan, Anggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan ,Pertanggungjawaban dan Pelaporan;	Desa	193	0	40	0	0,00	0	0	0,00
2	Pembinaan Pendapatan Desa, Pengelolaan Keuangan dan Pemanfaatan Aset Desa;	Penyusunan Pendapatan Desa, Pengelolaan Keuangan dan Pemanfaatan Aset Desa;	Desa	193	0	40	0	0,00	0	0	0,00
3	Pembinaan Sistem Informasi Keuangan dan Aset;	Tersusunnya Sistem Informasi Keuangan dan Aset;	Desa	193	0	40	0	0,00	0	0	0,00
8	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Cakupan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	%								
1	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa bidang Kawasan Pembangunan Perdesaan	Tersedianya Sumber daya Aparatur Yang berkompeten dan profesional	Orang	250	0	50	0	0,00	20	20	8,00
2	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa bidang Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa	Tersedianya Sumber daya Aparatur Yang berkompeten dan profesional	Orang	250	0	50	0	0,00	0	0	0,00
3	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa bidang manajemen Pemerintahan Desa	Tersedianya Sumber daya Aparatur Yang berkompeten dan profesional	Orang	250	0	50	0	0,00	-	0	0,00
4	Pelatihan Badan Perwakilan Desa Tentang Tugas fungsinya	Tersedianya Sumber daya Lembaga Desa Yang berkompeten dan profesional	Desa	250	0	50	0	0,00	0	0	0,00
5	Pembinaan Ketentraman, Ketertiban Umum	Pembinaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Desa;	Orang	250	0	18	0	0,00	0	0	0,00
6	Gelar Lomba Desa TK.Kab,Prop dan Nasional	Tersusunnya Standar, dan Pelaporan Evaluasi Perkembangan Desa	Desa	193	0	50	0	0,00	0	0	0,00
7	Penyusunan Profil Desa;	Tersusunnya Profil Desa;	Desa	250	0	10	0	0,00	0	0	0,00
8	Fasilitasi Penataan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa (RTRW) Desa	Tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah Desa (RTRW) Desa	Desa	250	0	10	0				

RENCANA KERJA 2021

9	Pemilihan dan Pelantikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Terpilihnya BPD	Desa	1359	0	36	0	0,00	0	0	0,00
10	Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa serentak	Terpilihnya kepala desa	Orang	193		36	193				
11	Pendampingan Musyawarah Desa	Fasilitasi Musyawarah Desa	Desa	193	0	14	0	0,00	0	0	0,00
9	Program Pengembangan Lembaga-lembaga Pemerintahan Desa	Cakupan Kerjasama dan tertatanya kelembagaan Pendukung Perangkat Desa									
1	Penyusunan Tupoksi Perangkat Desa	tersusunnya Topuksi Perangkat Desa	Dokumen	5	0	1	0	0,00	6	6	120,00
2	Pelatihan Pendukung Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa yang dilatih	Orang	275	0	55	0	0,00	0	0	0,00
3	Fasilitas Kerjasama antara Pemerintahan Desa	Jumlah kerjasama yang difasilitasi	Desa	25	0	10	0	0,00	0	0	0,00
4	Fasilitasi Kerjasama Lembaga Non Pemerintah	Jumlah CSR dengan Pemerintahan Desa	Desa	20	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00
5	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Antar Desa.	Jumlah Permasalahan Desa	Kasus	50	0	10	0	0,00	0	0	0,00
6	Fasilitasi pembinaan BKAD(Badan kerjasama antar desa) dan UPK (Unit Pelaksanaan Kegiatan) EX PNPM mandiri Perdesaan	Jumlah penyelesaian permasalahan BKAD	Kecamatan	85	17	16	0	0,00	0	17	20,00
7	Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah area Kawasan Perdesaan	kawasan Perdesaan	20	0	4	0	0,00	0	0	0,00
10	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Cakupan Jumlah Pembentukan,Pelembagaan,Pengembangan Pembinaan dan Pengelolaan BUMdesa									
1	Fasilitasi Pembentukan BUM Desa	Jumlah BUMdesa dibentuk	BUMDesa	193	18	20	0	0,00	0	18	9,33
2	Pelatihan Manajemen BUMdesa	Jumlah Pengurus yang mengikuti Manajemen BUMdesa	orang	193	0	100	0	0,00	0	0	0,00
3	Pelatihan BUMdesa dibidang Usaha Desa	Jumlah Pengurus yang mengikuti usaha Desa	orang	193	0	50	0				

RENCANA KERJA 2021

4	Fasilitasi Promosi Hasil Usaha BUMdesa	Jumlah kegiatan diikuti	Event	35	0	3	0	0,00	0	0	0,00
5	Pembinaan BUMdesa	Jumlah BUMdesa yang dibina	Desa	50		10	0				
11	Program Desa Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Perkembangan Pasar Desa	%								
1	Pemutakhiran Data Pasar Desa	Jumlah pasar Desa yang Aktif	Dokumen	5	1	1	0	0,00	0	1	20,00
2	Pemetaan Potensi Pasar Desa	Jumlah Desa yang memiliki Potensi membangun Pasar	Desa	485	0	97	0	0,00	0	0	0,00
3	Identifikasi Kebutuhan sarana dan Prasarana Produksi	Jumlah Desa yang membutuhkan sarana dan Prasarana Produksi	Desa	100	0	20	0	0,00	0	0	0,00
4	Identifikasi Kebutuhan sarana dan Prasarana Pemasaran	Jumlah Pasar Desa yang membutuhkan sarana dan Prasarana Pemasaran	Desa	100	0	20	0	0,00	0	0	0,00
5	Pendampingan Tim SATGAS Pembinaan dan Pengendalian Keuangan Desa	Jumlah Desa yang didampingi Dalam Percepatan Pembangunan Desa	Desa						6		
12	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Cakupan Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat	%								
1	Identifikasi Potensi Permodalan usaha masyarakat	Jumlah Desa yang Idenfikasi Potensi Permodalan Usaha Ekonomi Masyarakat	Desa	100	0	20	0	0,00	0	0	0,00
2	Sosialisasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	Jumlah Kecamatan Sosialisasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	Kecamatan	90	0	18	0	0,00	0	0	0,00
3	Fasilitasi Kredit Mikro		Desa	100	0	20	0	0,00	0	0	0,00
4	Identifikasi kelompok usaha masyarakat		Desa	100	27	20	0	0,00	0	27	27,00
5	Pelatihan Manajemen Ekonomi Rumah Tangga		Orang	400	0	40	0	0,00	0	0	0,00
13	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	cakupan Peran Perempuan di Pedesaan dalam usaha produktif	%								
1	Pelatihan perempuan di pedesaan bidang dalam usaha ekonomi produktif	Jumlah perempuan dilatih dalam bidang usaha ekonomi produktif	Lembaga	400	0	40	0				

RENCANA KERJA 2021

14	Program Peningkatan Sumber Daya Alam Lingkungan Pedesaan	Cakupan Jumlah Potensi dan Pemanfaatan SDA									
1	Sosialisasi hutan desa/hutan masyarakat	Jumlah aparat desa/kel yang mengikuti sosialisasi hutan desa/kel	Kecamatan	90	0	18	0	0,00	0	0	0,00
2	Pemetaan potensi hutan desa/hutan masyarakat	Jumlah desa yang memiliki potensi hutan desa	Dokumen	5	0	1	0	0,00	1	1	20,00
3	Fasilitasi Pemanfaatan Lahan Pasca tambang	Jumlah desa yang memiliki lokasi pasca Tambang	Desa	180	0	36	0				
4	Fasilitasi Penyediaan sarana prasarana air bersih	Jumlah desa yang terlayani fasilitas air bersih	Desa	75	0	15	0	0,00	0	0	0,00
5	Fasilitasi pemanfaatan tanah desa	Jumlah pemanfaatan tanah desa	Dokumen	90	0	1	0	0,00	0	0	0,00
6	Pemetaan Pengelolaan potensi sumber daya pesisir dan laut	Jumlah desa yang memiliki potensi pesisir laut	Desa	200	0	40	0	0,00	0	0	0,00
7	Pemetaan potensi dan permasalahan DAS (Daerah Aliran Sungai)	Jumlah Desa potensi dan permasalahan DAS (Daerah Aliran Sungai)	Desa	200	0	40	0	0,00	0	0	0,00
8	Fasilitasi peran serta masyarakat dalam Percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP)	Jumlah Desa yang mengikuti PPSP	Desa	150	0	30	0	0,00	0	0	0,00
15	Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Cakupan Pengembangan Dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	%								
1	Gelar TTG tingkat kabupaten	Jumlah Posyantek yang mengikuti gelar TTG kabupaten	Posyantek	90	0	18	0	0,00	0	0	0,00
2	Gelar TTG tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah Posyantek yang mengikuti gelar TTG Prop. Dan Nasional	Posyantek	50	0	10	0	0,00	0	0	0,00
3	Pemetaan Kebutuhan TTG Pedesaan	Jumlah Data dan peta Kebutuhan TTG Pedesaan	Dokumen	5	1	48	0	0,00			0,00
4	Fasilitasi Pemasarakatan TTG	Jumlah Pengguna TTG	Kelompok	400	0	80	0	0,00			0,00
5	Pelatihan Posyantek dibidang kelembagaan	Jumlah Posyantek yang dilatih	Posyantek	80	0	16	0	0,00			0,00
6	Fasilitasi Kerjasama TTG dengan Perguruan Tinggi/LIPI	Jumlah Kerjasama TTG dengan Perguruan Tinggi/LIPI	MOU	10	0	2	0	0,00			0,00

RENCANA KERJA 2021

7	Fasilitasi pengembangan TTG	Jumlah TTG yang dikembangkan	TTG	80	0	16	0	0,00		0,00
16	Program Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan	Cakupan Jumlah Fasilitas Sarana Prasarana								
1	Pemetaan Kebutuhan Pembangunan Permukiman Desa dan Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Pembangunan Permukiman Desa dan Kelurahan	Dokumen	5	0	1	0	0,00		0,00
2	Pembentukan Kelompok sarana prasarana perdesaan/kel (KPP)	Jumlah Kelompok sarana prasarana perdesaan/kel (KPP) dibentuk	KPP	150	0	30	0	0,00		0,00
3	Pemetaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa dan Kelurahan.	Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa dan Kelurahan.	Dokumen	5	0	1	0	0,00		0,00
4	Pemetaan Kebutuhan Pembangunan Sarana dan Prasarana Elektrifikasi Desa	Jumlah Kebutuhan Pembangunan Sarana dan Prasarana Elektrifikasi Desa	Dokumen	5	0	1	0	0,00		0,00
5	Pemetaan Kebutuhan Pembangunan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi Desa.	Jumlah Kebutuhan Pembangunan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi Desa.	Dokumen	5	0	1	0	0,00		0,00
6	Pendataan Sarana dan prasarana Embung Desa/Kelurahan	Jumlah Embung Desa/Kel yang didata	Dokumen	5	0	1	0	0,00		0,00
7	Fasilitasi Pemanfaatan Sarana Prasarana Embung Desa	Jumlah Desa yang mempunyai Embung Desa	Embung Desa	50	0	10	0	0,00		0,00
8	Sosialisasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PASIMAS)	Jumlah Desa yang disosialisasikan	Desa/Kel	225	0	45	0	0,00		0,00
9	Pembinaan Permukiman Kumuh Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kel yang dibina	Desa/Kel	160	0	32	0	0,00		0,00
16	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	Cakupan jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif	%							
1	Fasilitasi Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)	Jumlah Desa/kel yang difasilitasi	Desa	193	20	193	0	0,00		0,00
2	Fasilitasi Kuliah Kerja nyata (KKN)	Jumlah Mahasiswa KKN	Orang	1250	0	250	0	0,00		0,00

RENCANA KERJA 2021

3	Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) TK. Kab, Prop dan Nasional	Jumlah Desa yang mengikuti lomba Gotong royong	Desa/Kel	90	0	18	0	0,00		0,00
4	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)	Jumlah Kegiatan P3MD yang dimonitoring dan Evaluasi	Kecamatan	80	0	16	0	0,00		0,00
5	Penyusunan Profil Lembaga adat	Jumlah Seni Budaya Masyarakat, Adat Istiadat dan Kearifan Lokal.	Dokumen	5	0	1	0	0,00		0,00
6	Monitoring dan Evaluasi Lembaga adat	Jumlah lembaga adat yang ter evaluasi	Dokumen	5	0	1	0	0,00		0,00
7	Pembekalan dan Penguatan Peran satgas pelestarian pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya	Jumlah satgas pelestarian pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya yang mengikuti pembekal	Orang	600	0	120	0	0,00		0,00
8	Pembentukan Pokja pelestarian pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya Tingkat Kabupaten	Terbentuknya Pokja pelestarian pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya Tingkat Kabupaten	POKJA	5	0	1	0	0,00		0,00
9	Fasilitas Pembentukan Satgas pelestarian pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya Tingkat Kec, kel dan Desa	Terbentuknya satgas Desa/kel/Kec	Satgas	200	0	40	0	0,00		0,00
10	Pelatihan Perencanaan Pembangunan partisipatif Masyarakat Desa (P3MD) bagi Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah LPM, RT, PKK, Karang Taruna dan Lembaga adat yang aktif	Desa/Kel	395	0	79	0	0,00		0,00
17	Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Cakupan sumber daya masyarakat yang profesional	%							
1	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang dilatih	Orang	1050	0	210	0	0,00		0,00
2	Pembelajaran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang berprestasi	Orang	180	0	36	0	0,00		0,00
3	Monitoring dan Evaluasi Kader Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat aktif	Desa	350	0	70	0	0,00		0,00

RENCANA KERJA 2021

4	Fasilitasi Program kerja Pembinaan Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)	Jumlah PKK aktif	Kegiatan	75	0	15	0	0,00		0,00
5	Pembinaan dan penguatan Pokjantal Posyandu	Jumlah Pokjantal Posyandu aktif	POKJANAL	95	0	19	0	0,00		0,00
6	Pembinaan dan penguatan Kinerja Kader posyandu	Jumlah Posyandu aktif	KADER	3755	0	751	0	0,00		0,00
7	Pembinaan dan penguatan Kinerja TP. PKK	Jumlah PKK yang dibina	PKK	1280	0	256	0	0,00		0,00
8	Penguatan Sistem Informasi Posyandu (SIP)	Jumlah operator Posyandu yang dibina	POKJA	1280	0	256	0	0,00		0,00
9	Lomba Posyandu TK. Kab, Prop. Dan Nasional	Jumlah Posyandu yang berprestasi	POSYANDU	100	5	20	5	25,00		0,00
10	Sosialisasi Komite Kabupaten dan Pemberdayaan masyarakat dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (PBPTA)	Jumlah Pokmas yang mengikuti sosialisasi tentang PBPTA	POKMAS	35	0	7	0	0,00		0,00
11	Pelaksanaan HKG PKK Tk Kab. Provinsi dan Nasional	Jumlah event yang diikuti	Event	0	0	3	3	100,00		#DIV/0!
12	Lomba Posyandu, PKK-KB Kes dan PHBS Tk Kab, Provinsi dan Nasional	Jumlah event yang diikuti	Event	0	0	5	5	100,00		#DIV/0!
13	Pelaksanaan Jambore PKK Tk Nasional	Jumlah kegiatan yang diikuti	Kegiatan	0	0	1	1	100,00		#DIV/0!
18	Program Pengembangan Lembaga-lembaga Desa	Cakupan ketahanan Sosial Masyarakat dalam Pengembangan akses Informasi	%							
1	Fasilitasi Pengembangan Pengelolaan Media Informasi	Jumlah Desa yang difasilitasi Pengembangan Pengelolaan Media Informasi	Desa	125	0	25	0	0,00		0,00
2	Pemetaan Sarana Prasarana Perpustakaan Desa	Jumlah Sarana Prasarana Perpustakaan Desa	Desa	250	0	50	0	0,00		0,00
3	Sosialisasi dan pembentukan Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah Sarana Prasarana Kelompok Kegiatan belajar Masyarakat	Desa	250	0	50	0	0,00		0,00
4	Pelatihan Paralegal bagi Masyarakat	Jumlah paralegal yang dilatih	Orang	200	0	40	0	0,00		0,00

RENCANA KERJA 2021

5	Pelatihan Ketahanan Masyarakat desa	Jumlah Masyarakat yang terlatih dalam ketahanan sosial budaya	Orang	200	0	40	0	0,00		0,00
6	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Pelayanan publik bagi LPM	Jumlah LPM yang mengikuti bintek dalam pelayanan publik	Orang	200	0	40	0	0,00		0,00
7	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Pelayanan publik bagi PKK	Jumlah PKK yang mengikuti bintek dalam pelayanan publik	Orang	200	0	40	0	0,00		0,00
8	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Pelayanan publik bagi RT	Jumlah RT yang mengikuti bintek dalam pelayanan publik	Orang	200	0	40	0	0,00		0,00
9	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Pelayanan publik bagi Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna yang mengikuti bintek dalam pelayanan publik	Orang	200	0	40	0	0,00		0,00
10	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Pelayanan publik bagi Lembaga adat	Jumlah Lembaga adat yang mengikuti bintek dalam pelayanan publik	Orang	200	0	40	0	0,00		0,00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala
DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Dafip Haryanto, S. Sos, M.Si
Rembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700924 199003 1 001

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Visi dan Misi DINAS PMD yang tertuang dalam RENSTRA DINAS PMD Tahun 2019-2021 maka hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran dengan berdasarkan Analisis kinerja pelayanan DINAS PMD sesuai dengan RENSTRA DINAS PMD tertuang dalam capaian Sasaran Strategis tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kutai Kartanega

RENCANA KERJA 2021

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Presentasi Kompetensi Sesuai Bidang Tugas			100%	100%	100%	100%			
2	Prosentase PKK Aktif			60	75	100	100%			
3	Prosentase Posyandu Aktif			100	100	100	100%			
4	Prosentase LPM Berprestasi			40	50	60	100%			
5	Prosentase KPM Aktif			50	70	80	100%			
6	Prosentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan			0	75	85	100%			
7	Prosentase Perkembangan BUMDes Aktif			52	75	95	48%			
8	Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat			120	160	200	4%			
9	Jumlah Pengurus Pengelola Pasar Desa yang aktif			60	65	155	86%			
10	Prosentase Tata Administrasi Pemerintahan Desa yang baik			0	89	93	54%			
11	Prosentase Desa Pengguna Manfaat Teknologi Tepat Guna			40	50	60	100%			

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1. Tingkat Pelayanan DINAS PMD

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sesuai PERDA Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 64 Tahun 2016, DINAS PMD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Rendahnya keberdayaan masyarakat dan desa sebagai motor pembangunan;
- b. Dinamika Perkembangan Perekonomian Perdesaan yang masih belum optimal;
- c. Dinamika meningkatnya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Anak Balita yang disebabkan belum optimalnya peran Posyandu dan Polindes di pedesaan.

Kemudian pada RENSTRA DINAS PMD Tahun 2019-2021 dilakukan review berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 dan ditetapkan dengan Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dengan beberapa indikator utama yaitu :

- 1) Persentase kompetensi sesuai bidang tugas
- 2) Jumlah Kepala desa yang dilantik
- 3) Persentase Jumlah desa berkembang
- 4) Persentase Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih
- 5) Persentase Jumlah Peran Lembaga kemasyarakatan yang aktif
- 6) Jumlah PKK aktif
- 7) Jumlah Posyandu Aktif
- 8) Persentase Kinerja lembaga adat
- 9) Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) terbentuk
- 10) Jumlah Pemanfaatan Kelompok/Perorangan yang menggunakan TTG
- 11) Persentase Jumlah serapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Tabel. 2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanann SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke		
				2019	2020	2021
1	Terwujudnya Aparatur profesionalisme dalam melaksanakan tugas	Meningkatnya kompetensi pegawai sesuai bidang tugasnya	Persentase kompetensi sesuai bidang tugas	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Penataan, Administrasi Pemerintahan, Perkembangan Desa Pengembangan Kapasitas Aparatur yang profesional	Meningkatnya pelayanan Penataan administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kepala desa yang dilantik	0	70	0
		Meningkatnya Desa Mandiri	Persentase Jumlah desa berkembang	80%	90%	100%
		Meningkatnya kapasitas aparatur pemeritahan desa yang profesional	Persentase Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih	20%	20%	20%
3	Terwujudnya pemberdayaan Masyarakat dan peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong	Meningkatnya Masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam Partisipasif Perencanaan pembangunan perdesaan	Persentase Jumlah Peran Lembaga kemasyarakatan yang aktif	20%	20%	20%
4	Terwujudnya pemberdayaan adat istiadat sosial budaya daerah serta Pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	Meningkatkan memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan non medis	Jumlah PKK aktif	256	256	256
		Meningkatkan Layanan Kesehatan Masyarakat melalui non Lembaga kemasyarakatan	Jumlah Posyandu Aktif	100	100	60

		Meningkatkan Pemberdayaan Kinerja Lembaga adat	Persentase Kinerja lembaga adat	100%	100%	100%
5	Terwujudnya pengembangan Badan usaha ekonomi masyarakat melalui Pemanfaatan TTG (Teknologi Tepat Guna) dalam pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan perekonomian desa dengan memperkuat peran dan fungsi BUMDes, dalam menggali dan memanfaatkan potensi desa secara maksimal.	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) terbentuk	20	20	17
		Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan TTG (Teknologi Tepat Guna)	Jumlah Pemanfaatan Kelompok/Perorangan yang menggunakan TTG	30	30	28
6	Terwujudnya Pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa sesuai kaidah pelaporan yang baik	Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dalam pengelolaan keuangan dan aset Desa.	Persentase Jumlah serapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	100%	100%	100%

2. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah :

Secara struktur organisasi, saat ini DINAS PMD telah mencapai bentuk yang optimal dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi kriteria organisasi yang disyaratkan, hanya saja kelompok jabatan fungsional (Bidang Perencana, Peneliti dan Arsiparis) belum terbentuk. Keberadaan Sekretariat dan empat bidang lainnya yaitu :

a. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan:

- 1) Seksi Penataan Administrasi Pemerintahan, Keuangan Dan Aset Desa;
- 2) Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Dan Perkembangan Desa;
- 3) Seksi Kerjasama Desa;

b. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahkan:

- 1) Seksi Pelembagaan Dan Pengembangan Bumdesa;

- 2) Seksi Pengembangan Pasar Desa Dan Jaringan Pemasaran;;
 - 3) Seksi Tata Kelola Ekonomi, Permodalan Dan Pengembangan Kewirausahaan;
- c. **Bidang Pendayagunaan Sarana Prasarana, Sumber Daya Alam Dan TTG, membawahkan:**
- 1) Seksi Sumber Daya Alam, Rahabilitasi Dan Konservasi Lingkungan;
 - 2) Seksi Pengembangan Dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
 - 3) Seksi Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Prasarana;
- d. **Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Adat, membawahkan:**
- 1) Seksi Kelembagaan, Adat Istiadat, Perencanaan Dan Pembangunan Partisipatif;
 - 2) Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat;
 - 3) Seksi Pengembangan Akses Informasi Dan Ketahanan Masyarakat;

Dimana keempat bidang tersebut telah sesuai dan dapat mendukung fungsi-fungsi, walaupun membawa konsekuensi luas dalam aspek SDM dan fasilitas. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multidimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedepan, pengembangan kelembagaan DINAS PMD ditekankan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Peningkatan kapasitas ditujukan untuk memenuhi perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana di lembaga. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- 1) Belum jelasnya strategi pengembangan dan pelatihan, jenjang karir, penilaian kinerja, serta sistem kompensasi pegawai. Integrasi aspek-aspek tersebut merupakan kunci keberhasilan terciptanya sumber daya aparatur DINAS PMD yang mampu menjawab kompleksitas permasalahan dan dinamika perubahan yang terjadi ;
- 2) Belum meratanya kualitas dan kuantitas SDM DINAS PMD baik aspek perencanaan, pengendalian, data informasi dan penguasaan teknologi karena perencanaan yang berdaya guna dan berhasil guna sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparaturnya;

- 3) Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan perubahan kebijakan perencanaan daerah;
 - 4) Semakin besarnya tuntutan sistem perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, partisipatif, dan transparan berbasis teknologi termasuk aksesibilitas data dan informasi. Sedangkan akses informasi melalui jaringan internet masih belum dapat dimaksimalkan.
- 3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah**
Sesuai RPJMD Kutai Kartanegara Tahun 2019-2021, Visi Kutai Kartanegara adalah:

**"TERWUJUDNYA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA YANG MAJU,
MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN"**

Penjabaran makna dari MISI Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut adalah sebagai berikut :

MISI

1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat.
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten.
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah.
4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah.
5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah.
6. Meningkatkan Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak.

Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien, maka disusunlah misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut : Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, DINAS PMD mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Oleh karena itu, pernyataan Visi DINAS PMD Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu "**TERWUJUDNYA BERKETAHANAN MASYARAKAT MENUJU KEMANDIRIAN DESA**" memiliki hubungan yang erat terhadap Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Keterkaitan Visi DINAS PMD Kabupaten Kutai Kartanegara itu terletak di Misi (Misi 2: **Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten** serta Misi 7: **Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan** serta

penguatan perlindungan anak) RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2021 sehingga DINAS PMD memiliki peranan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional.

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DINAS PMD Kabupaten Kutai Kartanegara

Disamping permasalahan seperti yang pada poin b diatas, DINAS PMD memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mengawal GERBANG RAJA II. Dalam usaha pencapaian GERBANG RAJA II, DINAS PMD memiliki dinamika tantangan dan peluang sebagai berikut :

- a) Pentingnya peran DINAS PMD yang didukung oleh peraturan yang berlaku ;
- b) Pemberian porsi lebih anggaran sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada pembangunan desa;
- c) Dinas PMD selaku leading sektor pembangunan di desa, sampai saat ini belum dilibatkan secara maksimal dalam pembuatan regulasi yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan dan pembangunan di desa.

5. Formulasi isu-isu penting :

- Pentingnya peran DINAS PMD yang didukung oleh peraturan yang berlaku, oleh karena itu peningkatan porsi keterlibatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menyusun dan memformulasikan ketentuan dan peraturan yang mengarah kepada peningkatan capaian hasil dan peningkatan percepatan pembangunan di Desa/Kelurahan. Sehingga diharapkan peraturan (Perda/Perbup/SK Bupati) yang dihasilkan dapat terlaksana dan diharapkan menyentuh bagian terpenting dalam pemecahan permasalahan yang terjadi di desa. Hal ini didasarkan pada peranan langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun aparatur pemerintahan desa;
- Pemberian porsi lebih anggaran sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada pembangunan desa;
- Dinas PMD selaku leading sektor pembangunan di desa, sampai saat ini belum dilibatkan secara maksimal dalam pembuatan regulasi yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan dan pembangunan di desa.
- Pentingnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hal ini didasarkan pada realitas bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saat ini mengalami regenerasi. Peralihan Aparatur Sipil Negara yang disebabkan oleh habis masa

kerjanya (pensiun/purna tugas) maupun yang disebabkan mutasi karena karir pegawai ke kantor lainnya, fenomena ini juga menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga eksistensi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai leading sektor dalam pengembangan dan pembangunan serta mengadvokasi masyarakat di desa.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2021, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

RENCANA KERJA 2021

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	Keterangan
			Hasil Prgram (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
			Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
0000.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.0 Persen			1.867.624.480	3.957.927.758	
0000.01.104	Penyediaan jasa administrasi keuangan						300.000.000	0	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Honorarium Kegiatan	28.0 Orang/bulan	300.000.000		Renja SKPD
0000.01.106	Penyediaan alat tulis kantor						60.000.000	200.000.000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	35.0 Jenis barang	60.000.000		Renja SKPD
0000.01.107	Penyediaan barang cetakan dan						24.000.000	94.901.800	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Photocoy dan Barang cetakan yang disediakan	48000.0 Item barang dan lembar	24.000.000		Renja SKPD
0000.01.110	Penyediaan bahan logistik						25.000.000	200.000.000	

RENCANA KERJA 2021

	kantor								
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Bahan /Jenis Logistik Kantor yang disediakan	21.0 jenis Barang	25.000.000		Renja SKPD
0000.01.111	Penyediaan makanan dan minuman						40.000.000	317.526.206	
	Fasilitasi Penyediaan makan dan minum rapat dan tamu	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Makan minum rapat dan tamu	889.0 Porsi	40.000.000		Renja SKPD
0000.01.112	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah						350.000.000	823.038.000	
	Fasilitasi Perjalanan Dinas Aparatur Dinas PMD	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	50.0 Orang	350.000.000		Renja SKPD
0000.01.113	Penyediaan jasa administrasi Teknis						551.220.480	314.210.752	
	Fasilitasi Pembayaran Gaji PHL dan Penjaga Malam	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jasa tekhnis perkantoran	600.0 Orang/ Bulan	551.220.480		Renja SKPD
0000.01.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah						300.000.000	300.000.000	

RENCANA KERJA 2021

	Penataan Arsip Perangkat Daerah	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Saprass Pendukung Pengelolaan Arsip	6.0 Unit	300.000.000		Renja SKPD
0000.01.115	Penyediaan Jasa surat Menyurat						7.404.000	4.500.000	
	Penyediaan Materai	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Materai dan benda pos lainnya yang disediakan	1175.0 Lembar	7.404.000		Renja SKPD
0000.01.101	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air						50.000.000	1.703.751.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Tersedianya Pembayaran Biaya Langganan Internet dan TV Kabel	48.0 Rekening/Bulan	50.000.000		Renja SKPD
0000.01.140	Perlengkapan Kegiatan Hari-Hari Tertentu						75.000.000	0	
	Penyediaan Perlengkapan Kegiatan Hari-hari Tertentu	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Event/kegiatan yang dilaksanakan	3.0 Event	75.000.000		Renja SKPD
0000.01.181	Fasilitasi Tempat Kerja / Sewa Gedung /						85.000.000	0	
	Sewa Rumah untuk Gudang Arsip dan Aset OPD	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Tersedianya Sewa Gedung/Gudang Penyimpanan	12.0 Bulan	85.000.000		Renja SKPD

RENCANA KERJA 2021

					Aset OPD				
0000.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik	50.0 Persen			168.420.520	106.352.000	
0000.02.203	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						50.000.000	0	
	Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas operasional	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Terpeliharanya Kendaraan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	5.0 Unit	50.000.000		Renja SKPD
0000.02.204	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung						15.000.000	0	
	Terpeliharanya unit rutin/berkala peralatan gedung kantor	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Terpeliharanya Unit Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	10.0 Unit	15.000.000		Renja SKPD
0000.02.231	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor						103.420.520	106.352.000	

RENCANA KERJA 2021

	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	KEC Tenggarong,			Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.0 unit	103.420.520		Renja SKPD
0000.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rata-rata nilai kinerja SKP	85.0 Persen			200.000.000	0	
0000.05.503	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah						100.000.000	0	
	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Inovasi yang dihasilkan	2.0 Inovasi	100.000.000		Renja SKPD
0000.05.521	Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia ASN Perangkat Daerah						100.000.000	0	
	Fasilitasi Pelatihan dan Bimtek ASN Perangkat Daerah	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Terpenuhinya kapasitas aparatur sesuai bidangnya	10.0 orang	100.000.000		Renja SKPD
0000.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja		Tingkat konsistensi Renstra dan Renja, pelaporan keuangan dan	100.0 Persen			200.000.000	0	

RENCANA KERJA 2021

	dan keuangan		aset						
0000.06.601	Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan						200.000.000	0	
	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Tersusunnya Perencanaan , Pelaporan Kinerja, Keuangan dan Aset	10.0 Dokumen	200.000.000		Renja SKPD
0207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		Prosentase PKK Aktif Prosentase Posyandu Aktif Prosentase LPM Berprestasi Prosentase KPM Aktif Prosentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	75.0 Persen 100.0 Persen 50.0 Persen 70.0 Persen 75.0 Persen			2.222.500.000	305.000.000	
0207.15.501	Pembinaan dan Penguatan Kinerja TP. PKK Kecamatan, Desa						250.000.000	0	

RENCANA KERJA 2021

	dan Kelurahan								
	Pembinaan dan Penguatan Kinerja TP. PKK Kecamatan, Desa dan Kelurahan	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Program Kelompok Binaan PKK yang difasilitasi	5.0 Desa	250.000.000		Renja SKPD
0207.15.510	Pembinaan dan Penguatan Kinerja Kader						500.000.000	0	
	Pembinaan dan Penguatan Kinerja Kader Posyandu	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Posyandu yang dibina (Strata Posyandu)	35.0 Posyandu	500.000.000		Renja SKPD
0207.15.511	Pembinaan Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) dan Kelompok Kerja (POKJA) Posyandu Kab, Kec dan Desa/Kelurahan						125.000.000	125.000.000	
	Pembinaan Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Posyandu Kecamatan	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Pokjanal Posyandu yang difasilitasi dan dibina (Pokjanal posyandu)	18.0 Pokjanal	125.000.000		Renja SKPD
0207.15.516	Pelatihan Manajemen dan						150.000.000	0	

RENCANA KERJA 2021

	Penguatan Peran LPM dalam Pembangunan								
	Pelatihan Manajemen dan Penguatan Peran LPM dalam Pembangunan	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan (Orang)	18.0 Orang	150.000.000		Renja SKPD
0207.15.519	Pembinaan KPM Desa/Kelurahan						117.500.000	0	
	Pembinaan KPM Desa/Kelurahan	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Kader yang terbina	47.0 Orang	117.500.000		Renja SKPD
0207.15.523	Fasilitasi Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)						300.000.000	0	
	Fasilitasi Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Dokumen hasil Musrenbangdes	1.0 Dokumen	300.000.000		Renja SKPD
0207.15.527	Pembinaan Ketahanan Masyarakat						100.000.000	0	
	Pembinaan Ketahanan Masyarakat	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Masyarakat yang dibina	40.0 Orang	100.000.000		Renja SKPD
0207.15.532	Fasilitasi Satuan Kerja Khusus Program Pembangunan dan						180.000.000	180.000.000	

RENCANA KERJA 2021

	Pemberdayaan								
	Fasilitasi Satuan Kerja Khusus Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Kegiatan yang dilakukan Pendampingan	30.0 Kegiatan	180.000.000		Renja SKPD
0207.15.535	Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kinerja TP. PKK Kabupaten						500.000.000	0	
	Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kinerja TP. PKK Kabupaten	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kegiatan	5.0 Kegiatan	500.000.000		Renja SKPD
0207.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		Prosentase Perkembangan BUMDes aktif	75.0 Persen			1.007.500.000	157.500.000	
0207.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Pengurus Pengelola Pasar Desa yang aktif	160.0 Kelompok 65.0 Kelompok			1.007.500.000	157.500.000	

RENCANA KERJA 2021

0207.16.601	Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan bagi Kelompok Usaha Masyarakat di						160.000.000	0	
	Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan bagi Kelompok Usaha Masyarakat di	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Peserta yang terlatih	40.0 Orang	160.000.000		Renja SKPD
0207.16.604	Pelatihan kelompok kewirausahaan dan keterampilan kerja bagi rumah tangga miskin						175.000.000	0	
	Pelatihan kelompok kewirausahaan dan keterampilan kerja bagi rumah tangga miskin	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Kelompok yang mengikuti pelatihan	50.0 Orang	175.000.000		Renja SKPD
0207.16.605	Pelatihan Manajemen BUM Desa						350.000.000	0	
	Pelatihan Manajemen BUM Desa	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Peserta Pelatihan	120.0 Orang	350.000.000		Renja SKPD
0207.16.607	Fasilitasi Pembinaan Pembentukan BUM						165.000.000	0	

RENCANA KERJA 2021

	Fasilitasi Pembinaan Pembentukan BUM Desa	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Desa yang terfasilitasi	22.0 Desa	165.000.000		Renja SKPD
0207.16.615	Fasilitasi pembentukan pengelola Pasar Desa						157.500.000	157.500.000	
	Fasilitasi Pembentukan Pengelola Pasar Desa	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah desa yang difasilitasi	45.0 Desa	157.500.000		Renja SKPD
0207.27	Program pembinaan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa		Prosentase tata administrasi pemerintahan desa yang baik	89.0 Persen			903.148.000	0	
0207.27.707	Fasilitasi Ketatalaksanaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)						187.500.000	0	
	Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Anggota BPD	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Desa yang difasilitasi	25.0 Desa	187.500.000		Renja SKPD
0207.27.710	Pemutakhiran Data Indeks						200.000.000	0	
	Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Data IDM dan Profil Desa yang di mutakhirkan	2.0 Dokumen	200.000.000		Renja SKPD

RENCANA KERJA 2021

0207.27.720	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						100.000.000	0	
	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Kasus yang diselesaikan	5.0 Kasus	100.000.000		Renja SKPD
0207.27.724	Pendampingan Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP)						175.000.000	0	
	Pendampingan Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP)	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Kawasan yang didampingi	3.0 Kawasan	175.000.000		Renja SKPD
0207.27.734	Fasilitasi Kerja Sama Desa dan Antar Pemerintahan Desa						100.000.000	0	
	Fasilitasi Kerja Sama Desa dan Antar Pemerintahan Desa	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Desa yang difasilitasi	4.0 Desa	100.000.000		Renja SKPD
0207.27.735	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD						140.648.000	0	

RENCANA KERJA 2021

	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD dan DD	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Prosentase Desa Berkembang	75.0 Persen			
					Prosentase Tata Administrasi Pemerintahan Desa yang baik	90.0 Persen	140.648.000		Renja SKPD
0207.28	Program Pendayagunaan sarana prasarana, sumber daya alam dan Teknologi tepat guna		Prosentase Desa Pengguna Manfaat TTG	50.0 Persen			945.000.000	0	
0207.28.801	Gelar TTG tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional		Skor kualitas pemukiman desa	0.7 Persen			112.500.000	0	
	Partisipasi Gelar TTG Kabupaten, Provinsi dan Nasional				Jumlah Partisipasi yang diikuti	3.0 Event	112.500.000		Renja SKPD
0207.28.803	Fasilitasi Pelatihan POSYANTEK						178.500.000	0	
	Fasilitasi Pelatihan POSYANTEK	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Pengurus POSYANTEK yang terlatih	51.0 Orang	178.500.000		Renja SKPD
0207.28.805	Pendampingan Program Inovasi Desa (PID)						100.000.000	0	

RENCANA KERJA 2021

	Pendampingan Program Inovasi Desa (PID)	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Bursa Inovasi Desa	1.0 Event	100.000.000		Renja SKPD
0207.28.806	Fasilitasi Pembentukan Kelompok sarana prasarana perdesaan/kel (KPP)						154.000.000	0	
	Fasilitasi Pembentukan Kelompok sarana prasarana perdesaan/kel (KPP)	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Desa/Kel yang difasilitasi	44.0 Desa/Kel	154.000.000		Renja SKPD
0207.28.812	Fasilitasi Pemanfaatan Lahan Pasca tambang						100.000.000	0	
	Fasilitasi Pemanfaatan Lahan Pasca tambang	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah desa/kel yang mengelola lahan pasca Tambang	13.0 Desa/Kel	100.000.000		Renja SKPD
0207.28.814	Pelatihan Kelompok Sarana Pengelolaan Air Minum dan sanitasi berbasis masyarakat						300.000.000	0	
	Pelatihan Kelompok Sarana Pengelolaan Air Minum dan	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Peserta yang terlatih	120.0 Orang	300.000.000		Renja SKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- 2.5.1 Kegiatan ini kami peroleh ketika pelaksanaan Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan yang memang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Dari beberapa usulan yang disampaikan oleh masyarakat dalam forum musrenbang melalui perwakilannya, seperti Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa, Lembaga Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, maupun Tokoh Pemuda. Dalam prosesnya, forum musrenbang menampung seluruh aspirasi yang masuk untuk ditelaah kembali dan diklasifikasi tentang kebutuhan prioritas dan leading sektor yang mengkoordinir aspirasi tersebut.
- 2.5.2 Hasil klasifikasi dan telaah kebutuhan program prioritas yang sesuai dengan rencana pencapaian target program pemerintah daerah melalui RPJMD. Sehingga terdapat sinergisitas antara kebutuhan masyarakat dan kepentingan pemangku jabatan sebagaimana tujuan dan arah pembangunan yang berdasarkan pada RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten serta Renstra OPD terkait.
- 2.5.3 Diantara usulan yang telah diklasifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan pembidangan urusan tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.5.3

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	KECAMATAN	USULAN KEGIATAN	KEGIATAN SESUAI RENSRA	LOKASI	TARGET	PAGU ANGGARAN	CATATAN
1	Sangasanga	Pelatihan Managemen dan PenguatanPenguru Posyantek Kecamatan Sangasanga	Fasilitasi Pelatihan POSYANTEK	Sangasanga	1 Paket	20.000.000	Disetujui
2	Sangasanga	Pembelajaran Kader Pusyandu Kecamatan Sangasanga ke Daerah lain yang lebih maju	Pembinaan dan Penguatan Kinerja Kader Posyandu	Sangasanga	1 Paket	75.000.000	Disetujui
3	Sangasanga	Pelatihan Managemen dan Penguatan Penguru LPM Kelurahan Kecamatan Sangasanga	Pelatihan Manajemen dan Penguatan Peran LPM dalam Pembangunan	Sangasanga	1 Paket	50.000.000	Disetujui
4	Sangasanga	Sosialisasi tugas dan kewenangan kelembagaan kelurahan Jawa, Sarijaya, Sangasanga Dalam, dalam Pembangunan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	kelurahan Jawa , Sarijaya, Sangasanga Dalam	1 Paket	50.000.000	Disetujui

RENCANA KERJA 2021

5	Muara Jawa	Pelatihan Manajemen Pengurus RT Kel. Muara Jawa Tengah	Pembinaan Ketahanan Masyarakat	Kel Muara Jawa Tengah	32 Orang	30.000.000	Disetujui
6	Muara Jawa	Pelatihan Bintek LPM, Karang taruna, dan PKK Kel Dondang	Pembinaan Ketahanan Masyarakat	Kel Dondang	20 Orang	10.000.000	Disetujui
7	Muara Jawa	Pelatihan dan Bantuan Alat untuk Pengembangan Kerajinan Sapu lidi (UKM) kelompok Tani Kelapa Remaja RT. 11) Kel Muara Jawa Ilir	Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan bagi Kelompok Usaha Masyarakat di Pedesaan	Kel Muara Jawa Ilir	30 Orang	9.900.000	Disetujui
8	Muara Jawa	Pengadaan Pakaian Kelembagaan Kel muara Jawa Ilir	Fasilitasi Pembinaan Pembentukan BUM Desa	Kel Muara Jawa Ilir	4 Desa	30.000.000	Masih Didiskusikan
9	Muara Jawa	Pelatihan Bintek LPM, Karang taruna, dan PKK Kel Muara Jawa Ilir	Pembinaan dan Penguatan Kinerja TP. PKK Kecamatan, Desa dan Kelurahan	Kel Muara Jawa Ilir	1 kelompok	10.000.000	Disetujui
10	Kenohan	Pelatihan/Kursus Menjahit	Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan bagi Kelompok Usaha Masyarakat di Pedesaan	Desa Tuana Tuha	55 Orang	50.000.000	Disetujui

RENCANA KERJA 2021

11	Kembang Janggut	Pelatihan Kelompok PKK Desa Kelekat dan Kader Posyandu	Pembinaan dan Penguatan Kinerja TP. PKK Kecamatan, Desa dan Kelurahan	Desa Kelekat	2 kelompok	100.000.000	Disetujui
12	Kembang Janggut	Pelatihan Kelembagaan Desa kelekat	Pelatihan Manajemen dan Penguatan Peran LPM dalam Pembangunan	Desa Kelekat	10 Orang	100.000.000	Disetujui
13	Samboja	Diklat BUMDesa	Pelatihan Manajemen BUM Desa	Desa Tani Bakti	5 Orang	50.000.000	Disetujui
14	Muara Muntai	Pelatihan keterampilan Kelompok PKK	Pembinaan dan Penguatan Kinerja TP. PKK Kecamatan, Desa dan Kelurahan	Desa Jantur Baru	30 Orang	30.000.000	50.000.000
15	Muara Muntai	Pelatihan Digital Marketing Untuk UMKM (PKK)	Pembinaan dan Penguatan Kinerja TP. PKK Kecamatan, Desa dan Kelurahan	Desa Muara Muntai Ilir	20 Orang	200.000.000	Pagu disesuaikan
16	Tenggarong Sebrang	Pelatihan Tentang BUMDesa	Pelatihan Manajemen BUMDesa	Desa Karang Tunggal	1 Paket	100.000.000	Disetujui
17	Kota Bangun	Pelatihan Make Up (PKK) Desa Kedang Murung		Desa Kedang Murung		65.000.000	Disetujui

RENCANA KERJA 2021

18	Kota Bangun	Pelatihan BUMDesa Desa Kota bangun III		Desa Kota Bangun III		50.000.000	Disetujui
19	Kota Bangun	Pelatihan Posyandu Desa Kota bangun III		Desa Kota Bangun III		50.000.000	Disetujui
20	Kota Bangun	Pelatihan PKK Desa Kota Bangun III		Desa Kota Bangun III		5.000.000	Disetujui
21	Kota Bangun	Pelatihan Kader KPM (Kader Pembangunan Manusia) Desa Kota Bangun III		Desa Kota Bangun III		50.000.000	Disetujui
22	Kota Bangun	Pelatihan Kewirausahaan Kepemudaan Desa Kedang Murung		Desa Kedang Murung	20 Orang	100.000.000	Disetujui
23	Kota Bangun	Pelatihan Tata Boga (PKK) Desa Kedang Murung		Desa Kedang Murung		60.000.000	Disetujui
24	Kota Bangun	Pelatihan Manajemen BUMDesa Desa Kedang Ipil		Desa Kedang Ipil		0	Disetujui
25	Kota Bangun	Pelatihan Posyandu Desa Benua Baru		Desa Benua Baru		30.000.000	Disetujui
26	Kota Bangun	Pelatihan Pos Pindo Desa Benua Baru		Desa Benua Baru		25.000.000	Disetujui

RENCANA KERJA 2021

27	Kota Bangun	Pelatihan Kader Posyandu Desa Kota Bangun I		Desa Kota Bangun I		20.000.000	Disetujui
28	Kota Bangun	Pelatihan PKK Desa Kota Bangun 1		Desa Kota Bangun I		9.000.000	Disetujui
29	Samboja	Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelurahan (LPM) Kel Bukit Merdeka	Pembinaan Lembaga Pemasyarakat	Kel Bukit Merdeka	1 kelompok	25.000.000	Disetujui
30	Samboja	Pelatihan Manajemen BUMDesa Desa Tani Bakti	Pelatihan Manajemen BUMDesa Desa Tani Bakti	Desa Tani Bakti	5 Orang	50.000.000	Disetujui
31	Tenggarong	Pelatihan Manajemen Anggota PKK Kel Loa Tebu		Kel Loa Tebu	50 Orang	50.000.000	Disetujui
32	Tenggarong	Pelatihan Manajemen Pengurus LPM Kel Loa Tebu		Kel Loa Tebu	10 Orang	100.000.000	Disetujui
33	Marangkayu	Penguatan BUMDes	Pembiayaan dan Penguatan desa BUMDesa	Desa Sebuntal	5 Orang	100.000.000	Disetujui

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 adalah tahapan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP tadi, RPJMN 2020-2025, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (*Nawa Cita*) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025. RPJMN 2020-2025 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, RPJMN sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005-2025.

Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun, pembangunan nasional Indonesia lima tahun ke depan perlu memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antarkelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Agenda satu tahun pertama dalam Pembangunan Jangka Menengah 2020-2025, juga dimaksudkan sebagai upaya membangun fondasi untuk melakukan akselerasi yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, disamping melayani kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong mendesak. Dengan berlandaskan fondasi yang lebih kuat, pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lancar. Sementara, agenda lima tahun selama tahun 2020-2025 sendiri diharapkan juga akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi tahap-tahap pembangunan selanjutnya. Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk di dalamnya strategi pada tahun pertama, adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR, dengan penjelasan sebagai berikut:

Mandiri : berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Maju : berarti tingkat kemakmuran yang tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap.

Adil : berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah.

Makmur : berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.

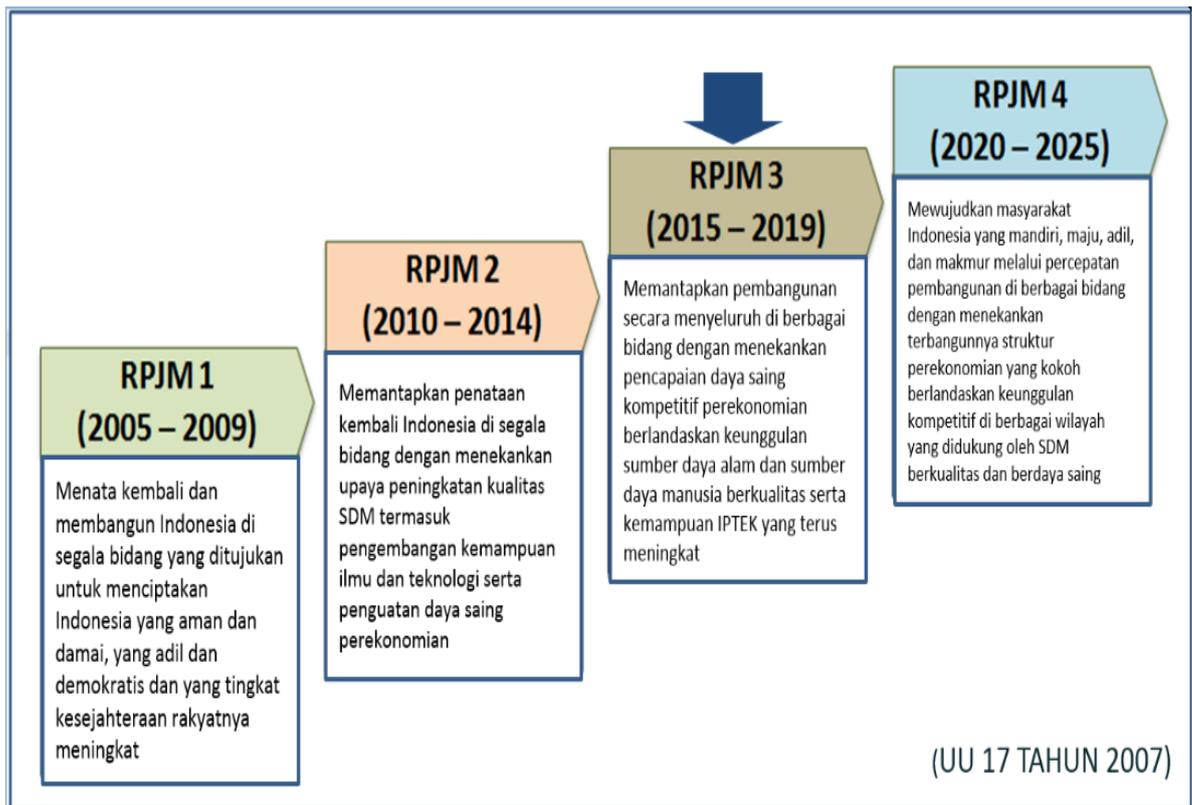
Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) misi yaitu:

1. **Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila** dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembang-kan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
2. **Mewujudkan bangsa yang berdaya saing** dengan membangun sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; mening-katkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju; mere-formasi bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekono-mian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah, menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.
3. **Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum** dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengem-bangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan membenahi struktur hukum, meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

4. **Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu** dengan membangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melampaui kekuatan esensial minimum dan disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.
5. **Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan** dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
6. **Mewujudkan Indonesia asri dan lestari** dengan memperbaiki pengelolaan pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal pembangunan.
7. **Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional** dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
8. **Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional** dengan memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen

Indonesia dalam pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendo-rong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarma-syarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang.

PJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan, yaitu :



Berdasarkan telaahan Kebijakan Nasional melalui RPJMN dapat disinergikan dengan RPJMD, RENSTRA OPD serta Rencana Kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah. Pada saat ini kita telah memasuki tahapan RPJMN 4 dari RPJPN, sehingga sangat diperlukan sinergisitas prioritas dan arah pembangunan pemerintah pusat dan daerah agar tujuan pembangunan Republik Indonesia yang telah dirancang secara sistematis melalui RPJPN maupun RPJMN dapat terlaksana secara maksimal.

Tabel 3.1

Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional dengan
Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah
1	Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengarusutamaan Gender 2. Menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang 3. Peningkatan investasi sektor UMKM 4. Menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparansi harga 5. Peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global 6. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru 7. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas (Integrasi Proses Hulu Hilir) 8. Peningkatan ekspor produk olahan 9. Peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan 10. Penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian 11. Penyediaan tenaga kerja petani melalui program transmigrasi

		<p>18. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur dan transportasi di kawasan Maloy, kawasan industri lainnya dan pusat pertumbuhan</p> <p>19. Peningkatan konektivitas antar kawasan</p>
2	Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan hutan dan lahan 2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan luas tutupan lahan. 3. Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi (green economy) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan 4. Pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi 5. Meningkatkan kualitas udara, perairan, dan lingkungan hidup perkotaan
3	Politik	-
4	Hukum	-
5	Pertahanan dan Keamanan	-
6	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standarisasi rencana dan prosedur tiga prioritas fokus 2. Peningkatan kapasitas dan manajemen

7	Kesejahteraan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Relevansi dan mutu pendidikan 2. Peningkatan kesempatan belajar anak 3. Peningkatan mutu di bidang kesehatan 4. Pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian bekerja 5. Penyediaan infrastruktur dasar bagi
8	Kewilayahan	-
9	Kelautan	-

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

No	MISI	TUJUAN
1	Mendorong peningkatan kapasitas aparatur penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dengan mendayagunakan potensi dan sarana yang ada sebagai upaya peningkatan etos kerja;daerah	Terciptanya aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Terciptanya profesionalisme Kartanegara dalam melaksanakan tugas
2	Mendorong dan membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang proporsional , profesional dan efektif	Terciptanya peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah dan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan

No	MISI	TUJUAN
3	Mendorong peningkatan peran serta lembaga masyarakat melalui manajemen perencanaan partisipatif sebagai alat ukur/evaluasi hasil pembangunan desa/kelurahan rangka mengintegrasikan, dan mensinergikan perencanaan pembangunan daerah	Terciptanya peningkatan peran serta lembaga masyarakat dalam program pembangunan perdesaan
4	Mendorong pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat dalam proses pembangunan berdasarkan nilai-nilai luhur kehidupan bermasyarakat dan kebersamaan	Terciptanya pemberdayaan adat istiadat dan sosial budaya daerah serta pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta kesejahteraan sosial
5.	Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan maksimalisasi Usaha Mikro dan Kecil, serta memanfaatkan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan	Terciptanya pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan
6	Mendorong dan membina kemandirian aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa yang akuntabel dan transparan., efektif dan efisien.	Terciptanya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa

Sasaran atau *objectives* organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang

spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sedangkan sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.2
Sasaran yang ditempuh untuk mencapai tujuan

NO	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1	2	3	4
1	Tujuan Pertama Terciptanya aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Terciptanya profesionalisme Kartanegara dalam melaksanakan tugas	a. Terwujudnya Optimalisasi Pelayanan Operasional Perkantoran b. Terpenuhinya sarana dan prasarana Penunjang kegiatan. c. Terwujudnya Tingkat Ketepatan waktu Pelaporan capaian kinerja dan keuangan d. Tingkat kesiapan Aparatur e. Peningkatan Etos kinerja aparatur.	a. Cakupan Layanan administrasi Perkantoran. b. Cakupan Layanan sarana Prasarana aparatur. c. Tingkat ketepatan waktu Pelaporan capaian kinerja dan keuangan. d. Cakupan disiplin aparatur. e. Jumlah aparatur yang mengikuti BinteK/Pelatihan, seminar dll.
2	Tujuan kedua Terciptanya peningkatan kapasitas dan	a. Terpenuhinya Peningkatan standart Pelayanan	a. Cakupan jumlah Aparatur Desa yang memahami tugas pokok

NO	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1	2	3	4
	profesionalisme aparaturn pemerintah dan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan	<p>Aparatur Pemerintahan Desa.</p> <p>b. Terwujudnya Lembaga Kemasyarakatan yang mendukung program pembangunan desa</p> <p>c. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan perdesaan secara partisipasi.</p>	<p>dan fungsi</p> <p>b. Cakupan jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berperan dan mendukung program pembangunan Desa</p> <p>c. Jumlah Perencanaan Program Pembangunan Desa yang sesuai dengan RPJMD dan Sinkronisasi kebutuhan desa bersumber dari Masyarakat</p>
3	Tujuan ketiga Terciptanya peningkatan peran serta lembaga masyarakat dalam program pembangunan perdesaan	<p>a. Terwujudnya partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan.</p> <p>b. Cakupan Aspek Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>a. Meningkatkan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan perdesaan secara partisipasi.</p> <p>b. Meningkatkan Peran serta Pemberdayaan Masyarakat.</p>

NO	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1	2	3	4
4	<p>Tujuan keempat</p> <p>Terciptanya pemberdayaan adat istiadat dan sosial budaya daerah serta pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta kesejahteraan sosial</p>	<p>Meningkatkan Fasilitas, Pembinaan serta kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan sosial</p>	<p>a. Jumlah lembaga Adat. b. Jumlah PKK dan Posyandu. c. Terwujudnya Peran Perempuan di Perdesaan.</p>
5	<p>Tujuan kelima</p> <p>Terciptanya pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan</p>	<p>a. Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui peran Bumdes b. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, serta kemampuan sosial ekonomi dan keswadayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan</p>	<p>a. Jumlah Bumdes yang berperan aktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa b. Jumlah usaha Kecil menengah di Desa/kelurahan</p>
	<p>Tujuan enam</p> <p>Terciptanya peningkatan kapasitas</p>	<p>Terpenuhinya standart pelayanan prima di masyarakat dan</p>	<p>Meningkatan Pelaksanaan pelatihan, seminar, workshop, pembelajaran,</p>

NO	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1	2	3	4
	aparatur pemerintah desa/kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa	terpenuhinya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perdesaan yang memadai	orientasi lapangan bagi aparatur pemerintahan desa dan kelurahan, dan Meningkatkan Pengelolaan keuangan dan Aset Desa

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Program Kerja dan Kegiatan

Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sedangkan sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2019 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya.

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik kantor sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masyarakat. Dalam tahun anggaran 2019 Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang akan dilaksanakan dihubungkan dengan sasaran strategis dan Indikator Kinerja. Berikut adalah Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun Anggaran 2019 :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara

RANCANGAN AKHIR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2021	Keterangan
			Hasil Prgram (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target		
0000.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.0 Persen			1.593.424.480	
0000.01.106	Penyediaan alat tulis kantor							
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	35 Jenis barang	80.000.000	
0000.01.107	Penyediaan barang cetakan dan							
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Photocoy dan Barang cetakan yang disediakan	48000.0 Item barang dan lembar	24.000.000	
0000.01.110	Penyediaan bahan logistik kantor							
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Bahan /Jenis Logistik Kantor yang disediakan	21 jenis Barang	25.000.000	
0000.01.111	Penyediaan makanan dan							

RENCANA KERJA 2021

	minuman							
	Fasilitasi Penyediaan makan dan minum rapat dan tamu	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Makan minum rapat dan tamu	889.0 Porsi	40.000.000	
0000.01.112	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah							
	Fasilitasi Perjalanan Dinas Aparatur Dinas PMD	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	50 Orang	350.000.000	
0000.01.113	Penyediaan jasa administrasi Teknis perkantoran							
	Fasilitasi Pembayaran Gaji PHL dan Penjaga Malam	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jasa tekhnis perkantoran	600 Orang/ Bulan	551.220.480	
0000.01.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah							
	Penataan Arsip Perangkat Daerah	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Supras Pendukung Pengelolaan Arsip	6 Unit		
0000.01.115	Penyediaan Jasa surat Menyurat							
	Penyediaan Materai	KAB KUTAI			Materai dan	1175		

RENCANA KERJA 2021

		KARTANEGARA,			benda pos lainnya yang disediakan	Lembar	7.404.000	
0000.01.101	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air							
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Air dan Listrik	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Tersedianya Pembayaran Biaya Langganan Internet dan TV Kabel	48 Rekening/Bulan	50.000.000	
0000.01.140	Perlengkapan Kegiatan Hari-Hari Tertentu						-	
	Penyediaan Perlengkapan Kegiatan Hari-hari Tertentu	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Event/kegiatan yang dilaksanakan	3 Event	75.000.000	
	Fasilitasi Tempat kerja/sewa gedung							
	Sewa rumah untuk gudang arsip dan aset OPD	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	-	
020701.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah							
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Honorarium yang dibayar	24 orang	350.000.000	
020701.06.114	Rekonsiliasi							

RENCANA KERJA 2021

	Pengelolaan Barang Milik Daerah							
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Honorarium yang dibayar	1 dokumen	40.800.000	
0000.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik	50.0 Persen			193.420.520	
0000.02.203	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional							
	Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas operasional	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Terpeliharannya Kendaraan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	5 Unit	75.000.000	
0000.02.204	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung							
	Terpeliharanya unit rutin/berkala peralatan gedung kantor	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Terpeliharanya Unit Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	10 Unit	15.000.000	
0000.02.231	Pengadaan peralatan dan perlengkapan							

RENCANA KERJA 2021

	gedung kantor							
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	KEC Tenggarong,			Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5 unit	103.420.520	
0000.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rata-rata nilai kinerja SKP	85.0 Persen			200.000.000	
0000.05.503	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah							
	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Inovasi yang dihasilkan	2 Inovasi	100.000.000	
0000.05.521	Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia ASN Perangkat Daerah							
	Fasilitasi Pelatihan dan Bimtek ASN Perangkat Daerah	KAB KUTAI KARTANEGARA,		100.0 Persen	Terpenuhinya kapasitas aparatur sesuai bidangnya	10.0 orang	100.000.000	
0000.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tingkat konsistensi Renstra dan Renja, pelaporan keuangan dan aset				450.000.000	

RENCANA KERJA 2021

0000.06.601	Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan							
	Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Tersusunnya Perencanaan, Pelaporan Kinerja, Keuangan dan Aset	10 Dokumen	450.000.000	Pagu kegiatan bertambah setelah kegiatan Penataan Arsip Perangkat Daerah dihapus
0207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		Prosentase PKK Aktif Prosentase Posyandu Aktif Prosentase LPM Berprestasi Prosentase KPM Aktif Prosentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	75.0 Persen 100.0 Persen 50.0 Persen 70.0 Persen 75.0 Persen			1.782.500.000	
0207.15.501	Pembinaan dan Penguatan Kinerja TP. PKK Kecamatan, Desa dan Kelurahan							
	Pembinaan dan Penguatan Kinerja TP. PKK Kecamatan, Desa dan Kelurahan	KAB KUTAI KARTANEGARA,		4 Klpk/Desa (20 Klpk)	Jumlah Program Kelompok Binaan PKK yang difasilitasi	10 Desa	150.000.000	Renja SKPD

RENCANA KERJA 2021

	Pelatihan Kelompok PKK Desa dan Kader Posyandu	Kembang janggut (Desa Kelekat)			Jumlah Program Kelompok Binaan PKK yang difasilitasi	5 orang	10.000.000	Kecamatan
	Pelatihan keterampilan Kelompok PKK	Muara Muntai (Jantur Baru)			Jumlah Program Kelompok Binaan PKK yang difasilitasi	5 orang	10.000.000	Kecamatan
	Pelatihan Digital Marketing Untuk UMKM (PKK)	Muara Muntai (Muara Muntai Ilir)			Jumlah Program Kelompok Binaan PKK yang difasilitasi	5 orang	10.000.000	Kecamatan
	Pelatihan Make Up (PKK) Desa Kedang Murung	Kota Bangun (Kedang Murung)			Jumlah Program Kelompok Binaan PKK yang difasilitasi	5 orang	10.000.000	Kecamatan
	Pelatihan Posyandu Desa Kota bangun III	Kota Bangun (Desa Kota Bangun III)			Jumlah Program Kelompok Binaan PKK yang difasilitasi	5 orang	10.000.000	Kecamatan
	Pelatihan PKK Desa Kota Bangun III	Kota Bangun (Desa Kota Bangun III)			Jumlah Program Kelompok Binaan PKK yang difasilitasi	5 orang	10.000.000	Kecamatan

RENCANA KERJA 2021

	Pelatihan Tata Boga (PKK)	Kota Bangun (Desa Kedang Murung)			Jumlah Program Kelompok Binaan PKK yang difasilitasi	5 orang	10.000.000	Kecamatan
	Pelatihan PKK	Kota Bangun (Desa Kota Bangun 1)			Jumlah Program Kelompok Binaan PKK yang difasilitasi	5 orang	10.000.000	Kecamatan
	Pelatihan Manajemen Anggota PKK	Tenggarong (Kel Loa Tebu)			Jumlah Program Kelompok Binaan PKK yang difasilitasi	5 orang	10.000.000	Kecamatan
0207.15.510	Pembinaan dan Penguatan Kinerja Kader							
	Pembinaan dan Penguatan Kinerja Kader Posyandu	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Posyandu yang dibina (Strata Posyandu)	35 Posyandu	140.000.000	Renja SKPD
	Pembelajaran Kader Pusyandu Kecamatan Sangasanga ke Daerah lain yang lebih maju	Sanga-Sanga			Jumlah Kader yang dibina	5 orang	10.000.000	Kecamatan
	Pelatihan Posyandu	Kota Bangun (Benua Baru)			Jumlah Kader yang dibina	5 orang	10.000.000	Kecamatan
	Pelatihan Pos Bindu Desa Benua Baru	Kota Bangun (Benua Baru)			Jumlah Kader yang dibina	5 orang	10.000.000	Kecamatan

RENCANA KERJA 2021

	Pelatihan Kader Posyandu	Kota Bangun (Desa Kota Bangun I)			Jumlah Kader yang dibina	5 orang	10.000.000	Kecamatan
	Pelatihan Posyandu	Kota Bangun (Desa Kota bangun III)			Jumlah Program Kelompok Binaan PKK yang difasilitasi	5 orang	10.000.000	Kecamatan
	Pelatihan Posyandu Desa Kota bangun III	Kota Bangun (Desa Kota Bangun III)			Jumlah Program Kelompok Binaan PKK yang difasilitasi	5 orang	10.000.000	Kecamatan
0207.15.511	Pembinaan Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) dan Kelompok Kerja (POKJA) Posyandu Kab, Kec dan Desa/Kelurahan							
	Pembinaan Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Posyandu Kecamatan	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Pokjanal Posyandu yang difasilitasi dan dibina (Pokjanal posyandu)	18 Pokjanal	125.000.000	Renja SKPD
0207.15.516	Pelatihan Manajemen dan Penguatan Peran LPM dalam Pembangunan							

RENCANA KERJA 2021

	Pelatihan Manajemen dan Penguatan Peran LPM dalam Pembangunan	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan (Orang)	40 Orang	135.000.000	Renja SKPD
	Pelatihan Manajemen dan Penguatan Penguru LPM Kelurahan Kecamatan Sangasanga	Sanga-Sanga			Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan	5 orang	15.000.000	Kecamatan
0207.15.519	Pembinaan KPM Desa/Kelurahan							
	Pembinaan Kader Pembangunan Manusia Desa	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Kader yang terbina	47 Orang	117.500.000	Renja SKPD
0207.15.523	fasilitasi Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)							
	fasilitasi Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah desa yang difasilitasi	28 desa	150.000.000	Renja SKPD
0207.15.527	Pembinaan Ketahanan Masyarakat							
	Pembinaan Ketahanan Masyarakat	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Masyarakat yang dibina	40.0 Orang	150.000.000	Renja SKPD

RENCANA KERJA 2021

	Pelaksanaan penataan Kelembagaan dan Penguatan Lembaga Kemasyarakata Desa dan lembaga Adat Desa	Sanga-Sanga			Jumlah Lembaga yang diberdayakan	5 orang	10.000.000	Kecamatan
	Pelatihan Manajemen Pengurus RT Kel. Muara Jawa Tengah	Kel. Muara Jawa Tengah			Jumlah Lembaga yang dilatih	5 orang	10.000.000	Kecamatan
	Pelatihan Bintek LPM, Karang taruna, dan PKK Kel Dondang	Kel. Dondang			Jumlah Lembaga yang dilatih	5 orang	10.000.000	Kecamatan
	Pelatihan Bintek LPM, Karang taruna, dan PKK Kel Muara Jawa Ilir	Muara jawa Ilir			Jumlah Lembaga yang dilatih	5 orang	10.000.000	Kecamatan
	Pelatihan Kelembagaan Desa kelekat	Kembang Janggut (kelekat)			Jumlah Lembaga yang dilatih	5 orang	10.000.000	Kecamatan
	Pelatihan Kader KPM (Kader Pembangunan Manusia)	Kota bangun (Desa Kota Bangun III)			Jumlah Lembaga yang dilatih	5 orang	10.000.000	Kecamatan
	Pembinaan Lembaga Pemasarakatan Kelurahan (LPM) Kel Bukit Merdeka	Samboja (Bukit Merdeka)			Jumlah Lembaga yang dilatih	5 orang	10.000.000	Kecamatan

RENCANA KERJA 2021

	Pelatihan Manajemen Pengurus LPM	Tenggarong (Loa Tebu)			Jumlah Lembaga yang dilatih	5 orang	10.000.000	Kecamatan
0207.15.532	Fasilitasi Satuan Kerja Khusus Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)							
	Fasilitasi Satuan Kerja Khusus Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah desa yang dildampingi	30 Desa	100.000.000	Renja SKPD
0207.15.535	Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kinerja TP. PKK Kabupaten							
	Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kinerja TP. PKK Kabupaten	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kegiatan	5 Kegiatan	150.000.000	Renja SKPD
	Pembinaan KPM Desa/Kelurahan							
	Rakor Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa/Kelurahan	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Kader yang mengikuti RAKOR	40 orang	100.000.000	Renja SKPD

RENCANA KERJA 2021

	Pembinaan Kader Pembangunan Manusia Desa/Kelurahan (KPM)							
	Monev Rembuk Stunting Desa (Desa Lokus Stunting Tahun 2021	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah desa yang di Monev	25 desa	100.000.000	Renja SKPD
	Fasilitasi Satuan Kerja Punggawa Desa (Prgram P3DK)	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Punggawa yang difasilitasi	193 desa	120.000.000	Renja SKPD
0207.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	KAB KUTAI KARTANEGARA,	Prosentase Perkembangan BUMDes aktif	75.0 Persen			917.348.000	
			Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat	160.0 Kelom pok				
			Jumlah Pengurus Pengelola Pasar Desa yang aktif	65.0 Kelom pok				
0207.16.601	Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan bagi Kelompok Usaha Masyarakat di							

RENCANA KERJA 2021

	Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan bagi Kelompok Usaha Masyarakat dipedesaan	KAB KUTAI KARTANEGARA,		100%	Jumlah Peserta yang terlatih	40 Orang	140.000.000	Renja SKPD
	Pelatihan dan Bantuan Alat untuk Pengembangan Kerajinan Sapu lidi (UKM) kelompok Tani Kelapa Remaja RT. 11)	Muara Jawa (Kel Muara Jawa Ilir) Kecamatan			Jumlah Peserta yang terlatih	10 orang	20.000.000	Kecamatan
	Pelatihan Kewirausahaan Kepemudaan	Kota Bangun (Kedang Murung) Kecamatan			Jumlah Peserta yang terlatih	10 orang	20.000.000	Kecamatan
0207.16.604								
	Pelatihan kelompok kewirausahaan dan keterampilan kerja bagi rumah tangga miskin							
	Pelatihan kelompok kewirausahaan dan keterampilan kerja bagi rumah tangga miskin	KAB KUTAI KARTANEGARA,		100%	Jumlah rumah tangga yang mengikuti pelatihan	50 Orang	175.000.000	Renja SKPD
0207.16.605	Pelatihan Manajemen BUM Desa							

RENCANA KERJA 2021

	Pelatihan Manajemen BUM Desa	KAB KUTAI KARTANEGARA,		100%	Jumlah pengurus BUMDES yang mengikuti Pelatihan	25 BUMDES	137.348.000	Renja SKPD
	Pelatihan Manajemen BUM Desa	Samboja (Tani Bhakti) Kecamatan			Jumlah Peserta Pelatihan	5 orang	10.000.000	Kecamatan
	Pelatihan Manajemen BUM Desa	Tenggarong Seberang (Karang tunggal) Kecamatan			Jumlah Peserta Pelatihan	5 orang	10.000.000	Kecamatan
	Pelatihan Manajemen BUMDesa (Unit Usaha)	Kota Bangun (Desa Kedang Ipil) Kecamatan			Jumlah Peserta Pelatihan	5 orang	10.000.000	Kecamatan
0207.16.607	Fasilitasi Pembinaan Pembentukan BUM							
	Fasilitasi Pembinaan Pembentukan BUM Desa	KAB KUTAI KARTANEGARA,		100%	Jumlah Desa yang difasilitasi	15 Desa	120.000.000	Renja SKPD
	Rakoor BUMDES se Kabupaten Kutai Kartanegara	KAB KUTAI KARTANEGARA,		100%	Jumlah Desa yang mengikutin RAKOR	193 desa	100.000.000	Renja SKPD
	Penyusunan Dokumen, Draf Peraturan Perundang-Undangan tentang							

RENCANA KERJA 2021

	Usaha Ekonomi Pedesaan							
	Penyusunan PERBUP tentang Juknis BUMDes	KAB KUTAI KARTANEGARA,		100%	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen	75.000.000	Renja SKPD
0207.16.615	Fasilitasi pembentukan pengelola Pasar Desa							
	Fasilitasi Pembentukan Pengelola Pasar Desa	KAB KUTAI KARTANEGARA,		100%	Jumlah pasar desa yang difasilitasi	15 pasar Desa	100.000.000	Renja SKPD
0207.27	Program pembinaan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa		Prosentase tata administrasi pemerintahan desa yang baik	89.0 Persen			1.355.000.000	Renja SKPD
0207.27.707	Fasilitasi Ketatalaksanaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)							
	Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Anggota BPD	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah anggota BPD yang dipilih dan dilantik	420 anggota	130.000.000	Renja SKPD
0207.27.710	Pemutakhiran Data Indeks							
	Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	100.000.000	Renja SKPD

RENCANA KERJA 2021

0207.27.720	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							
	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah permasalahan yang diselesaikan	5 Kasus	100.000.000	Renja SKPD
	Identifikasi Perkembangan Desa (Profil Desa)							
	Identifikasi Perkembangan Desa (Profil Desa)	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Dokumen yang disusun	1 dokumen	100.000.000	Renja SKPD
	Sosialisasi Aplikasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	40 orang	100.000.000	Renja SKPD
0207.27.734	Fasilitasi Kerja Sama Desa dan Antar Pemerintahan Desa							
	Fasilitasi Kerja Sama Desa dan Antar Pemerintahan Desa	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah desa yang difasilitasi	4 desa	100.000.000	Renja SKPD
0207.27.735	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBDes							
	Monitoring dan	KAB KUTAI			Jumlah desa	30 desa		Renja SKPD

RENCANA KERJA 2021

	Evaluasi Pelaksanaan APBDes	KARTANEGARA,			dimonev		120.000.000	
	Optimalisasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKUdes)	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah desa mengikuti optimalisasi	50 desa	125.000.000	Renja SKPD
	Penyusunan Draf Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemerintahan Desa	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah dokumen yang disusun	7 dokumen	130.000.000	Renja SKPD
	Penjaringa Perangkat Desa	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah desa yang difasilitasi	25 desa	120.000.000	Renja SKPD
	Fasilitasi Perencanaan, Anggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Desa	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah tim verifikasi yang difasilitasi	16 kecamatan	115.000.000	Renja SKPD
	Penataan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Desa	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah desa yang difasilitasi	16 desa	115.000.000	Renja SKPD
0207.28	Program Pendayagunaan sarana prasarana, sumber daya alam dan Teknologi tepat guna		Prosentase Desa Pengguna Manfaat TTG Skor kualitas pemukiman desa	50.0 Persen 0.7 Persen			1.022.500.000	

RENCANA KERJA 2021

	Fasilitasi pembentukan POSYANTEK dan POSYANTEKDES							
	Fasilitasi pembentukan POSYANTEKDES	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah Desa yang difasilitasi	50 Desa	150.000.000	Kegiatan tersebut merupakan konversi dari kegiatan Fasilitasi Pelatihan POSYANTEK yang telah ditiadakan karena kegiatan tersebut target sudah tercapai. Dasar pembentukan POSYANTEKDES adalah Permendes PDT No 23 Th 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan TTG dalam Pengelolaan SDA Desa
	Fasilitasi Pelatihan POSYANTEK	KAB KUTAI KARTANEGARA,				Sanga-Sanga	20.000.000	Kecamatan
	Pelatihan dan Bantuan Alat untuk Pengembangan Kerajinan Sapu lidi (UKM) kelompok Tani Kelapa Remaja RT. 11) Kel Muara Jawa Ilir				Jumlah kelompok yang difasilitasi	Muara Jawa (Kel. Ma jawa Ilir)	20.000.000	Kecamatan

RENCANA KERJA 2021

0207.27.724	Pendampingan Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP)	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah kawasan yang difasilitasi	3 Kawasan	120.000.000	Renja SKPD
0207.28.801	Partisipasi Gelar TTG Kabupaten, Provinsi dan Nasional							
	Partisipasi Gelar TTG Kabupaten, Provinsi dan Nasional	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah event yang dilaksanakan	3 event	112.500.000	Renja SKPD
0207.28.805	Pendampingan Program Inovasi Desa (PID)							
	Pendampingan Program Inovasi Desa (PID)	KAB KUTAI KARTANEGARA,		100%	Jumlah Bursa Inovasi Desa	1 event	120.000.000	Renja SKPD
0207.28.806	Fasilitasi Pembentukan Kelompok sarana prasarana perdesaan/kel (KPP)							
	Monev Kelompok Pengelola sarana prasarana perdesaan/kel (KPP)	KAB KUTAI KARTANEGARA		100%	Jumlah KPP Desa/Kel yang difasilitasi	44 KPP	120.000.000	Renja SKPD
0207.28.812	Fasilitasi Pemanfaatan Lahan Pasca tambang							
	Fasilitasi Pemanfaatan Lahan Pasca tambang	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah desa/kel yang difasilitasi	13 Desa/K el	120.000.000	Renja SKPD
	Sosialisasi pengelolaan lingkungan, Sumber Daya Alam dan hutan desa							

RENCANA KERJA 2021

	Sosialisasi pengelolaan lingkungan, Sumber Daya Alam dan hutan desa (Program Iklim)	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	40 orang	120.000.000	Renja SKPD	
0207.28.814	Pelatihan Kelompok Sarana Pengelolaan Air Minum dan sanitasi berbasis masyarakat								
	Monev Kelompok Sarana Pengelolaan Air Minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Prpgram PAMSIMAS)	KAB KUTAI KARTANEGARA,			Jumlah kelompok yang diMonev	47 desa	120.000.000	Renja SKPD	
TOTAL ANGGARAN 2021								7.514.193.000	

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala
Dafip Haryanto, S. Sos, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700924 199003 1 001

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2021 ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan anggaran tahun 2020, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja 2021 dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

a. Catatan penting

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good, clean and open governance* di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini kami buat dan dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga diharapkan dapat meningkatkan sinergisitas antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara dengan OPD yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang telah kami susun melalui Renja ini. Selain beberapa hal yang telah dipaparkan diatas, kami juga menyampaikan beberapa point catatan penting yaitu :

1. Dalam proses penyusunan Renja OPD diharapkan dapat mengakomodir aspirasi, terutama aspirasi masyarakat grass root berbasis Bottom up. Dalam hal ini harus ada sinkronisasi program prioritas hasil pelaksanaan Musrenbangdes dengan Musrenbang Kecamatan.
2. Dalam penyusunan Program prioritas kecamatan dan desa harus berbasis potensi/kemampuan desa masing-masing dari sisi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengacu pada Data Indeks Desa Membangun (IDM)
3. Meningkatkan kerjasama dan komunikasi simultan antar instansi guna menghasilkan ide-ide pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tersusun.

4. Menciptakan good and clean goverment dengan melakukan langkah-langkah legalitas pelaksanaan program dan kegiatan yang berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam penyusunan anggaran seharusnya berbasis kinerja (*money follow function*).

b. Kaidah kaidah pelaksanaan

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021 dengan efektif dan efisien.
2. Rencana Kerja Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2021, dimana Rencana Kerja Tahun 2021 dijabarkan lebih lanjut dalam
3. dokumen pelaksanaan anggaran.
4. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021.
5. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2021 mengacu pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tahapan tatacara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.

c. Tindak Lanjut

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara ini, ada beberapa langkah tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mengawal realisasinya. Diantaranya adalah :

1. Menjaga konsistensi Aparatur dalam menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD;
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparatur serta sumber daya yang ada pada OPD;
3. Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik guna menghindari friksi-friksi dan miss comunication dalam lingkungan OPD serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi untuk

inventarisasi dan sinkronisasi sehingga menciptakan hubungan kerjasama yang sinergis;

4. Melakukan pressure (tekanan) terhadap Pemerintah Desa untuk meningkatkan kinerja serta menciptakan inovasi-inovasi dalam pelayanan publik maupun inovasi-inovasi yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa sehingga hasilnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kemandirian desa.

Rencana Kerja Tahun 2021 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan penelaahan dan penyelarasan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergisitas, harmonisasi dan efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tenggarong, Juli 2020

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala

Dafip Haryanto, S. Sos, M.Si
Rembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700924 199003 1 001